

Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia

Iput Wiliyan Pradana
Universitas Negeri Surabaya
Iput_akuntansi@yahoo.com

Abstract

The Purpose of this study is to know the Indonesia's tax income grow. This study used comparative methods, that compare the same variable but more than two sample, or compared in the different time. This study is use a secunder data. The result for this study is show that Indonesia's tax income growth is good enough. It can be seen from the Indonesia's tax income always increase every year. It caused that the tax reform give a big effect to the Indonesia's tax income growth.

Keywords : Tax Income Growth, Tax Reform, comparative methods

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 2005 pemerintah menyusun tiga RUU yang mengubah tiga UU perpajakan yang saat itu berlaku. Ketiga UU yang akan diamandemen yaitu UU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dan UU mengenai Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn/PPNBM). Ketiga UU tersebut diamandemen karena selain merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dan praktik penerapan hukum perpajakan, juga merupakan kunci hukum yang akan menjadi hal yang paling utama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Amandemen UU Perpajakan tahun 2005 ini menandai dilaksanakannya reformasi perjakan kelima, sejak bergantinya sistem perpajakan nasional. Sebelumnya pemerintah telah melaksanakan reformasi perpajakan tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997, dan tahun 2000. Reformasi perpajakan kali ini cukup menarik, karena memiliki arti khusus, yaitu memperkuat upaya panarimaan pajak yang semakin menjadi tulang punggung dalam pembiayaan keuangan negara. (Gunawan dan Hidayat : 2005)

Namun karena kondisi ekonomi masyarakat yang tak memungkinkan, maka diputuskan bahwa UU PPN dan UU PPnBM perlu ditinjau lagi, agar wajib pajak (terutama perusahaan) tidak terbebani dua kali. Stabilitas sektor moneter dan keuangan merupakan dua hal penting bagi ekonomi Indonesia. Stabilisasi itu secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap variabel-variabel ekonomi makro. Kondisi perekonomian Indonesia rentan oleh pengaruh dari faktor-faktor perubahan ekonomi eksternal, dan variabel nonekonomi, sehingga pengelolaan ekonomi perlu dilakukan seimbang.

Era globalisasi dan otonomi membutuhkan perlakuan baru dalam pengelolaan fiskal. Guna mendukung karakter *good governance*, dan dukungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pajak, disusunlah reformasi perpajakan 2008 yang merubah mengenai Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan. Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia”

Rumusan Masalah

Bagaimana pencapaian hasil penerimaan pajak setelah reformasi pajak tersebut?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerimaan pajak setelah adanya reformasi pajak.

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. (Maksum Priangga, 2009)

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi

menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Undang-undang Perpajakan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *std* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *std* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah *std* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan *stdd* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *stdd* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Refomasi Pajak

Reformasi pajak memiliki makna yang luas dan terus berkembang. Williamson dalam Mas'ood (1994:60) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada asset yang berada di luar negeri.

Sedangkan Anggito Abimanyu menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. (R. Bagus J. G. Kusuma : 2009). Lebih melengkapi konsep tentang reformasi perpajakan, Aviliani berpendapat bahwa tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kekuatan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan dituntut untuk menciptakan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Meliputi pula pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Reformasi pajak yang menyeluruh diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak dan jumlah wajib pajak yang patuh pun semakin meningkat. (R. Bagus J. G. Kusuma : 2009).

Selain itu Jit B.S. Gill menyatakan, suatu sistem penerimaan negara yang mengurus masalah pajak perlu di reformasi dengan sedikitnya 4 (empat) alasan utama. Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah

aktual pajak yang mengalir ke kas negara tergantung pada efisiensi dan efektifitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi dan pengembangan sektor swasta. Ketiga, administrasi perpajakan secara rutin kerap muncul dalam daftar teratas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih. (R. Bagus J. G. Kusuma : 2009)

Reformasi Pajak (Tax Reform) Tahun 1983

Reformasi pajak (tax reform) atau pembaruan perpajakan, telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. Bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang, yaitu:

UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang-undang tersebut berlaku sejak 1 Januari 1984.

UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga, tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang maka undang-undang tersebut diperlakukan mulai 1 April 1985.

UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (BM).

Undang-undang No. 12 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 mulai diberlakukan tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1991 dikeluarkan Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1991.

Reformasi Pajak (Tax Reform) Tahun 1994

Reformasi perpajakan tidak berhenti begitu saja, tetapi terus dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian. Pada tahun 1991, perubahan pertama dilakukan terhadap Pajak Penghasilan. Kemudian pada tahun 1994, setelah satu dasawarsa peraturan pajak dilaksanakan diadakan lagi serangkaian perubahan terhadap peraturan perpajakan. Undang-undang pajak yang dikeluarkan adalah:

UU Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

UU Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991.

UU Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPnBM).

UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada, yaitu:

UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.

UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Reformasi Pajak (Tax Reform) Tahun 2000

Pada tahun 2000 seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang telah ada, yaitu:

UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).

UU Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Reformasi Pajak (Tax Reform) 2008

Pada tahun 2008, terjadi perubahan undang-undang dan disahkanlah UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Fungsi Pajak

Menurut (Wahyudi Pratama, 2010), Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya :

Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif. Yaitu, metode penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Atau variabel yang sama tetapi pada dua sampel atau lebih, atau dibandingkan dalam waktu yang berbeda.

Pembahasan menggunakan pengumpulan data-data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, antara lain : Direktorat jendral pajak, Departemen Keuangan, Kementrian Keuangan RI.

Pembahasan

Perkembangan APBN dalam

Tabel 1
Perkembangan APBN dalam Tiga Tahun Terakhir

Keterangan	2009	2010	2011
		unaudited	APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	848,8	1.017	1.101,20
(persentase perubahan per tahun)		19,8	8
I. Penerimaan Dalam Negeri	847,1	1.014,30	1.101,20
1. Penerimaan Perpajakan	619,9	744,4	850,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,2	269,9	250,9
II. Hibah	1,7	2,8	3,7
B. Belanja Negara	937,4	1.062,90	1.229,60
(persentase perubahan per tahun)		13,39	15,68
I. Belanja Pemerintah Pusat	628,8	718,20	836,60
II. Transfer ke Daerah	308,6	344,7	393
C. Surplus/defisit Anggaran % terhadap PDB	(88,6)	(45,8)	(124)
	(1,6)	(0,7)	(1,8)
D. Pembiayaan	112,6	90,5	124,7
(Persentase perubahan per tahun)		(19,63)	37,79
I. Dalam Negeri	128,1	95,5	125,3
II. Luar Negeri	(15,5)	(5)	(0,6)

Sumber : Data olahan

Pendapatan Negara dan Hibah

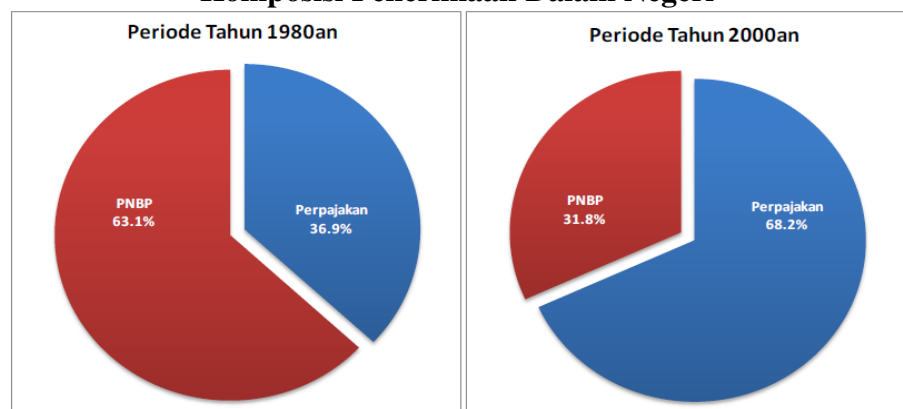
Pendapatan negara dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Dilihat dari kontribusinya, penerimaan dalam negeri mampu memberikan kontribusi lebih besar dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang atau bantuan luar negeri dalam melaksanakan pembangunan. Pada tabel IV dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.017,1 triliun atau 102,5 persen dari target APBN-P 2010, dengan penerimaan dalam negeri Rp1.014,3 triliun dan hibah Rp2,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, pencapaian pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 19,8 persen. Sampai dengan tiga bulan pertama tahun 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah

mencapai Rp213,8 triliun, yaitu 19,3 persen dari target APBN 2011. Realisasi penerimaan dalam negeri adalah sebesar Rp213,7 triliun atau 19,4 persen target, sedangkan hibah Rp0,06 triliun atau 1,7 persen dari target. Penerimaan perpajakan memberikan pemasukan sebesar Rp170,3 triliun, sedangkan PNBPN Rp43,4 triliun. Secara persentase terhadap target APBN 2011, pencapaian penerimaan perpajakan pada tiga bulan pertama tahun 2011 adalah 20,0 persen, lebih tinggi dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,6 persen dari target APBN-P 2010. Sementara itu, pencapaian PNBPN sampai dengan Maret 2011 adalah 17,3 persen dari target APBN 2011, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun 2010 yang sebesar 11,9 persen dari target APBN-P 2010. Tingginya realisasi PNBPN terutama berasal dari penerimaan SDA, khususnya SDA migas.

Berdasarkan perkembangan sampai dengan akhir bulan Maret 2011 tersebut, pendapatan negara dan hibah diperkirakan dapat mencapai target APBN 2011 dengan didukung pelaksanaan kebijakan perpajakan dan PNBPN secara tepat. Penerimaan perpajakan akan sangat didukung oleh penerimaan pajak perdagangan internasional yang diperkirakan akan melampaui target, sedangkan PNBPN akan sangat ditopang oleh penerimaan SDA migas.

Komposisi Penerimaan dalam Negeri

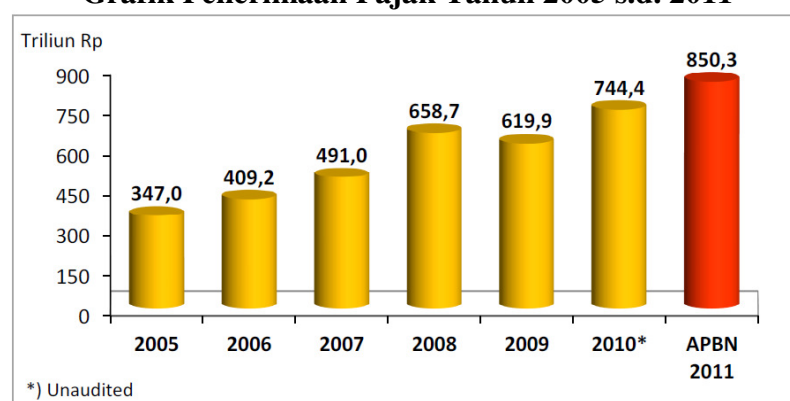
Tabel 2
Komposisi Penerimaan Dalam Negeri



Sumber : Kementrian keuangan

Dalam periode 2005-2011, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan perpajakan lebih dari dua kali lipat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp744,4 triliun pada tahun 2010. Dalam kurun waktu tersebut, total penerimaan perpajakan cenderung meningkat, seperti terlihat dalam Grafik IV.3, kecuali tahun 2009 karena melemahnya perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap melambatnya laju perekonomian Indonesia pada tahun tersebut.

Tabel 3
Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2005 s.d. 2011



Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2010, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp744,4 triliun yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp124,5 triliun atau 20,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009. Pencapaian tersebut merupakan 100,2 persen dari target APBN-P 2010. Kontribusi terbesar bagi penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan PPh, khususnya PPh nonmigas, serta PPN dan PPnBM. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, realisasi PPh nonmigas pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 11,3 persen..

Selain dengan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan, pada tahun 2010 pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif di bidang perpajakan, antara lain: (i) penurunan tarif PPh badan dari 28 persen menjadi 25 persen, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 36 Tahun 2008; (ii) pemberian keringanan tarif PPh badan 5 persen lebih rendah dari tarif normal bagi perusahaan yang minimal 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik; (iii) pelaksanaan amandemen undang-undang PPN yang secara umum lebih

memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan daya saing bagi pengusaha Indonesia di luar daerah pabean; dan (iv) pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas PPh, PPN dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan dunia usaha serta stabilisasi harga di dalam negeri.

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2011 sebesar Rp850,3 triliun atau meningkat sebesar 14,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2010. Penerimaan perpajakan tersebut terutama diharapkan berasal dari penerimaan PPh nonmigas dan PPN dan PPnBM, masing-masing ditargetkan sebesar Rp364,9 triliun dan Rp312,1 triliun. Sementara itu, PBB dan pajak lainnya ditargetkan mencapai Rp31,9 triliun, dan cukai Rp62,8 triliun. Untuk pajak perdagangan internasional, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp23,0 triliun terdiri dari bea masuk Rp17,9 triliun dan bea keluar Rp5,1 triliun. (Kementrian Keuangan RI : 2012)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, perkembangan penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat dari semua sisi penerimaan negara baik dari pajak maupun bukan pajak, semua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa reformasi perpajakan memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan supaya semua wajib pajak di Indonesia sebaiknya patuh akan semua kewajiban pajaknya dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku karena tingkat perkembangan penerimaan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Dengan patuhnya wajib pajak, maka secara otomatis akan memperlancar arus perekonomian di negara tersebut. karena pajak merupakan

sumber penerimaan dan pendanaan negara, sekaligus pemerata perekonomian masyarakat di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- J. G. Kusuma, R. Bagus, 2009, *Tinjauan Teoritis Terhadap UU KUP*, viewed 19 July, Diakses pada : <http://baguskusuma.wordpress.com/xmlrpc.php>
- Kementrian Keuangan RI, 2012, *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012*, Jakarta : Penerbit Kementrian Keuangan RI
- Pajak Penghasilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
- Pratama, wahyudi, 2010, *Perkembangan Pajak di Indonesia*, viewed 25 July, Diakses pada <http://wahyudi01.blogspot.com/2010/02/perkembangan-pajak-di-indonesia.html>
- Priangga, Maksum, 2009, *Pengertian dasar dan Ciri-Ciri Pajak – Definisi Pajak*, viewed 25 July, Diakses pada : <http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html>
- Setiyaji, Gunawan, dan Amir, Hidayat, 2005, *Evaluasi Kinerja Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Esa Unggul